

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

COVID-19 telah dinyatakan status pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan sekitar 200.000 kasus telah diidentifikasi dan lebih dari 8.000 orang dinyatakan meninggal di lebih dari 160 negara (Spinelli & Pellino, 2020, p. 107). Lebih lanjut, COVID-19 memiliki dampak lain terhadap banyak aspek dalam kehidupan. Mulai dari sosial, ekonomi, budaya, hingga politik. Dalam aspek politik, COVID-19 membuat banyak negara di ranah global untuk menyesuaikan dan membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendukung tata cara atau pedoman hidup selama pandemi COVID-19, Indonesia tidak terkecuali.

Di Indonesia sendiri, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pedoman hidup di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya dengan penerapan kebijakan/pedoman protokol kesehatan berdasarkan panduan WHO melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Salah satu bentuk pelaksanaan protokol kesehatan adalah menjaga jarak atau *physical distancing* yang mengharuskan tiap-tiap individu yang beraktivitas di luar rumah untuk menjaga jarak fisik minimal satu meter yang mana kebijakan ini terus diimbau pemerintah kepada masyarakat meski masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya serta aspek menjaga jarak dalam penerapan protokol kesehatan di era normal baru memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah di antara praktik pencegahan COVID-19 lainnya, merujuk pada data survey yang dilakukan UNICEF bersama AC Nielsen pada tahun 2020 dengan responden sebanyak 2000 orang. Dimana aspek menjaga jarak dalam serangkaian perilaku protokol kesehatan memiliki presentase paling rendah yakni hanya bernilai 47% saja. Dapat disimpulkan perilaku menjaga jarak lebih rendah kepatuhannya daripada perilaku memakai masker yang bernilai 71%

dan perilaku mencuci tangan yang bernilai 72%. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam penerapan *physical distancing* tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari manusia yang pada dasarnya makhluk sosial, dan senang untuk berkumpul. Selain itu adanya persepsi ‘tidak enak’ jika harus menjauh secara fisik dari orang sekitar dan melihat di lingkungan sekitarnya tidak ada yang menjaga jarak menjadi faktor masih rendahnya tingkat kepatuhan *physical distancing* di masyarakat (Laraspati, 2020).

Untuk fokus dalam penelitian ini, adalah pengaruh sosialisasi COVID-19 terhadap kepatuhan penerapan *physical distancing* pada masyarakat yang mengakses informasi seputar COVID-19 pada akun Instagram milik pemerintah yakni @lawancovid19\_id khususnya pada aspek *physical distancing* dimana pemerintah mengakomodasikan kebijakannya tersebut melalui imbauan dan penyajian informasi seputar COVID-19 melalui Instagram resmi dengan tujuan untuk mensosialisasikan masyarakat agar mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Menurut (Wehby, 2020) dalam (Dolfinus et al., 2021), pelaksanaan kebijakan dan peraturan pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah pencegahan penularan di masa pandemi Covid-19 guna menekan angka penularan. Dalam (Sata Shanka & Moges Menebo, 2021, p. 1277), masyarakat cenderung menilai informasi terkait COVID-19 jika diterima dari sumber terpercaya (Fridman, 2020). Selain itu, individu lebih menghargai rekomendasi kesehatan dan menganggapnya adil ketika informasi tersebut berasal dari lembaga yang terpercaya (Zheng, B., & M., 2020). Ini akan meningkatkan kesadaran akan tingkat keparahan pandemi, yang pada gilirannya akan memotivasi orang untuk mematuhi pedoman pencegahan COVID-19.

Saat ini khususnya di Indonesia, media baru yaitu media digital menjadi media besar yang paling populer. Media baru meliputi media sosial, blog, website dan media digital lainnya. Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna internet yang cukup besar dan media baru menjadi media yang cukup efektif disukai oleh para elit politik untuk mengartikulasikan kepentingannya melalui saluran digital. Menurut internetworldstats.com, Indonesia menempati urutan ke-15 di Asia dalam hal penetrasi internet. Menurut We Are Social dan Hootsuite, ada lebih dari 200

juta pengguna internet di Indonesia, di mana 170 juta di antaranya aktif menjelajah media sosial.

Media sosial saat ini menjadi saluran komunikasi politik terpenting dengan publik. Berbagai usulan kebijakan, pernyataan dan komentar lain tentang isu politik dapat diposting di media sosial. Selain sangat terbuka dan mudah diakses, ada biaya terkait yang lebih rendah daripada menggunakan media tradisional atau mengadakan pertemuan publik secara fisik. Media arus utama tidak hanya terpusat (hanya satu arah), tetapi juga mahal penggunaannya. Konsekuensi dari penggunaan jejaring sosial juga sangat penting. Karena jejaring sosial bisa menjangkau semua bidang, termasuk komentar (Indrawan & Efriza, 2018) dalam (Indrawan & Ilmar, 2018, p. 10).

Media sosial bisa menjadi tempat berkumpulnya para tokoh politik di banyak tempat dan di banyak waktu. Aktor-aktor tersebut seperti mereka yang berkuasa, pejabat, politisi, partai politik, badan politik lainnya dan tentunya masyarakat. Media sosial memungkinkan demokrasi siber yang dapat menggunakan media sosial untuk mendukung kegiatan komunikasi politik. Misalnya, penguasa yang ingin mengomunikasikan kebijakan publik, politisi dan partai politik yang ingin menciptakan citra dan kampanye elektoral, dan masyarakat yang ingin mengkritik kebijakan dan pemerintahan penguasanya. Semua interaksi ini terjadi di dunia maya (Indrawan & Ilmar, 2018, p. 15).

Oleh karena itu, media digital menjadi medium populer yang digunakan tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengartikulasikan kebijakan dan kepentingan pemerintah kepada masyarakat luas yang mana di dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaruh informasi mengenai COVID-19 yang dilakukan secara kontinuitas oleh pemerintah terhadap kepatuhan masyarakat menjalankan tindak pencegahan penularan COVID-19 dengan menerapkan protocol kesehatan terutama pada aspek perjalanan physical distancing atau perilaku menjaga jarak yang lebih sering kurang diperhatikan dibanding dua protocol kesehatan lainnya (memakai masker dan mencuci tangan).

Pencegahan juga dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam mencegah COVID-19 dengan memberikan pedoman tindakan pencegahan terkait Rancangan

Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, masker, alat pelindung diri, pengangkutan tenaga pendukung, persediaan dan pengobatan dengan pasien suspek COVID-19, meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi terkait virus corona untuk menghindari kepanikan informasi yang salah, membangun paradigma positif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 (Dewiyuliana & Septiana, 2020).

Pemerintah terus berupaya untuk mengimplementasikan kebijakannya tersebut melalui komunikasi dan informasi yang gencar dilakukan baik *online* maupun *offline*. Secara *online*, salah satu kanal resmi informasi dan edukasi COVID-19 milik pemerintah Indonesia adalah melalui *web site* [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) yang berisi data-data dan artikel mengenai COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memiliki Instagram resmi yang juga memberikan informasi seputar COVID-19 dengan *user name* @lawancovid19\_id yang merupakan akun Instagram milik Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

*Physical distancing* merupakan program penentuan posisi yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan non-anggota keluarga dan berjarak minimal 1 meter (Adrian, 2020) dalam (Pratama & Hidayat, 2020). Di Indonesia, cara ini telah dilakukan oleh semua lembaga atau institusi, baik swasta maupun pemerintahan. Bahkan dalam mendukung program menjaga jarak fisik (*physical distancing*), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mencakup pembelajaran jarak jauh atau *home based learning* yang juga dikenal dengan istilah *Study From Home* (SFH), ibadah jarak jauh yang dilakukan dari rumah, hingga melakukan pekerjaan secara *remote* dari rumah masing-masing yang juga disebut dengan *Work From Home* (WfH) (Pratama & Hidayat, 2020). Peraturan ini bertujuan guna mengurangi kontak sosial guna mengurangi keramaian atau keramaian.

Dengan adanya sosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memberi edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahaya COVID-19 serta tata cara pencegahannya secara terus menerus dan berkelanjutan, seperti dalam penelitian

yang dilakukan oleh Dewiyuliana dan Septiana (2021) dimana pencegahan juga dipengaruhi oleh peran pemerintah untuk mencegah COVID-19 dengan memberikan standar tindakan pencegahan, meningkatkan komunikasi, edukasi, dan informasi terkait COVID-19 untuk menghindari kepanikan informasi yang salah, membangun paradigma positif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan menyebabkan potensi pada kepatuhan yang rendah. Menurut Notoatmodjo (2007), dalam (Niruri et al., 2021, p. 79) pengetahuan juga merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku manusia. Perilaku yang berbasis pada pengetahuan bisa lebih bertahan dalam waktu yang lebih lama daripada tanpa pengetahuan. Selaras dengan penelitian oleh Zulhafandi dan Ariyanti (2020), dimana pengetahuan mengenai COVID-19 berhubungan dengan perilaku patuh untuk menerapkan *physical distancing*.

Gugus Tugas Covid-19 mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Prokes) menjadi indikator penting yang harus diwaspadai semua pihak. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama satu setengah tahun, namun kepatuhan terhadap protokol kesehatan masyarakat masih fluktuatif (Nursyamsi, 2021). Seperti dilansir Gugus Tugas COVID-19, upaya peningkatan kepatuhan masyarakat salah satunya dilakukan melalui sosialisasi mengenai komunikasi risiko secara besar-besaran yang menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk materi berbasis seni dan budaya (covid19.go.id, 2021). Sosialisasi tersebut salah satunya melalui media sosial resmi pemerintah yang secara konsisten dan berkelanjutan mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protocol kesehatan yang berlaku, serta mengedukasi masyarakat mengenai informasi seputar COVID-19 yang diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran dari dalam diri berbekal pengetahuan tentang COVID-19 sehingga masyarakat mematuhi langkah pencegahan penularan COVID-19 ini salah satunya penerapan kebijakan protocol kesehatan.

Lebih lanjut, riset-riset yang dilakukan pasca merebaknya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sangat penting peran kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19. Dalam (Goldstein & Wiedemann, 2021, p. 2), kepatuhan terhadap kebijakan publik dapat dianggap sebagai tindakan keyakinan dari warga negara. Agar bersedia menukar otoritas individu dengan mandat pemerintah, warga negara harus percaya bahwa suatu kebijakan itu bermanfaat. Artinya, mereka harus mengevaluasi kebijakan dan menyimpulkan ada manfaat positif yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian atau sanksi yang terkait dengan ketidaktaatan. Seperti dalam penelitian yang dikaji oleh Aquarini (2020), dimana masyarakat cenderung tidak menolak arahan pemerintah untuk melakukan *physical distancing* meskipun arahan tersebut ditetapkan oleh aktor politik yang tidak disukai oleh masyarakat akan tetapi peraturan yang ditetapkan harus memberikan insentif lain kepada masyarakat seperti pemberian bantuan langsung atau kekeluasaan kepada masyarakat untuk tetap bisa berbisnis dengan mengikuti protokol kesehatan. Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Fathimah, dkk (2021), bahwa sebagian besar masyarakat sudah mematuhi anjuran pemerintah untuk menjalankan serangkaian langkah preventif dalam penanggulangan virus COVID-19 yang juga didasari dengan faktor lain dan persepsi yang ditimbulkan secara internal dan eksternal seperti kesadaran dari diri sendiri, kepentingan, kepercayaan pada pemerintah, dan ancaman yang dirasakan.

Disamping itu, studi lain yang menyebutkan kegagalan implementasi kebijakan protokol kesehatan dibahas dalam penelitian Sari (2021) yang mana pelanggaran masyarakat tidak semata-mata merupakan bentuk ketidakpatuhan, akan tetapi faktor yang mendasari pelanggaran protokol kesehatan adalah kurangnya pengetahuan tentang risiko COVID-19. Bentuk ketidaktaatan mereka yang tidak mengikuti protokol kesehatan pemerintah adalah karena motivasi finansial, ketidakpedulian, kurangnya kesadaran akan masalah, serta kurangnya kepercayaan kepada pemerintah yang menetapkan peraturan serta pernyataan yang inkonsisten. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, masyarakat yang menolak bisa melakukan tindakan pembangkangan hingga menyebabkan konflik dengan aparat kepolisian karena masyarakat bereaksi atas peraturan *physical distancing*

yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan mereka (McCarthy, Murphy, Sargeant, & Williamson, 2021).

Ketidakpatuhan semacam itu didasari atas persepsi dan pengetahuan yang mendasari perilaku individu untuk mau mengikuti atau menolak arahan pemerintah dalam hal pencegahan COVID-19. Karenanya komunikasi pemerintah yang baik harus dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hyland-Wood, dkk (2021), dimana komunikasi krisis pemerintah yang efektif memerlukan keterlibatan sebagai salah satu faktor kunci dalam efektivitas komunikasi kirisis oleh pemerintah yang menghendaki komunikasi dua arah. Tanggapan pemerintah yang cepat juga sangat penting sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik untuk mengikuti dan mematuhi arahan-arahan dari pemerintah. Komunikasi pemerintah yang efektif berpotensi menjadi strategi yang baik dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 dimana dalam penelitian oleh Ilona Fridman dkk (2020) bahwa sumber informasi yang bersumber dari pemerintah adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada sumber informasi dari media swasta dan media sosial.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih terdapat celah yang belum dibahas yakni belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai isu terkait komunikasi kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19 khususnya melalui media Instagram untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menerapkan arahan pemerintah terkait protokol kesehatan yang mana berdasarkan permasalahan yang dihadapi dimana masyarakat masih banyak yang abai terhadap kepatuhan tersebut.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian  | Nama Peneliti                       | Hasil Penelitian  | Nama Jurnal   |
|----|---|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Pengaruh Penyebaran Informasi COVID19 Melalui WhatsApp Terhadap Kesiapan Masyarakat Dalam Menghadapi COVID-19 | Dewiyuliana & Nenty Septiana (2021) | Terdapat pengaruh antara penyebaran informasi tentang COVID-19 melalui jejaring sosial WhastApp dengan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pandemi COVID-19.  | <i>Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal</i> , 11(1).<br>p-ISSN 2089-0834; e-ISSN 2549-8134 |
| 2. | Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Kepatuhan Physical Distancing Mencegah Penyebaran COVID-19                | Aquarini (2020)                     | Tidak ada penolakan untuk patuh terhadap penerapan <i>physical distancing</i> meskipun datang dari pemimpin yang kurang disukai orang tersebut. Tetapi, kebijakan pemerintah yang memberi solusi terhadap kebijakan <i>physical distancing</i> mempengaruhi kepatuhan seperti memberi bantuan tunai secara langsung serta memberi keleluasaan pada masyarakat agar tetap bisa berbisnis dengan mengikuti protokol kesehatan untuk | <i>Anterior Jurnal</i> , 19(2).<br>p-ISSN: 1412-1395; e-ISSN: 2355-3529                                 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  | memutus rantai persebaran COVID-19   |  |
| 3. | Hubungan Pengetahuan Tentang COVID-19 Dengan Kepatuhan <i>Physical Distancing</i> Di Tarakan                     | Zulhafandi & Ririn Ariyanti (2020)   | Pengetahuan mengenai COVID-19 memiliki hubungan dengan kepatuhan menerapkan perilaku <i>physical distancing</i>  | <i>Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam</i> , 8(2).p-ISSN: 2549-0532; e-ISSN: 2623-2553  |
| 4. | Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Selama Pandemi: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenous | Anggi Fithrian Fathimah, Mirza Fadhilla Al-Islami, Tiara Gustriani, Harsa Afifatur Rahmi, Indra Gunawan, Ivan Muhammad Agung, Desma Husni (2021) | Sebagian besar responden mengikuti aturan dan anjuran pemerintah dalam menangani COVID 19. Individu menentukan bahwa mereka mengikuti aturan dan rekomendasi pemerintah karena berbagai alasan, termasuk kepercayaan diri, kepentingan, kepercayaan pada pemerintah, dan kesadaran akan ancaman. | <i>Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi</i> , 2(1). e-ISSN: 2720- 8958   |
| 5. | <i>Policing COVID-19 Physical Distancing Measures: Managing Defiance And Fostering Compliance Among</i>          | Molly McCarthy, Kristina Murphy, Elise Sargeant & Harley Williamson (2021)   | Individu yang membangkang secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk mematuhi pembatasan jarak fisik. Selain itu faktor lain pembangkangan terhadap peraturan <i>physical distancing</i> karena khawatir   | <i>International Journal of Researching and Policy: Policing and Society</i> , 31(5). e-ISSN: 1477-2728; p-ISSN: 1043-9463 |

|    |  |                          |   |   |
|----|--|--------------------------|---|---|
|    | <i>Individuals Least Likely To Comply</i>  |                          | tentang hilangnya kebebasan yang berkelanjutan pasca COVID-19.  |   |
| 6. | Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur) | Ratna Karika Sari (2021) | Pelanggaran yang dilakukan tidak semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan. Masih ada warga yang secara tidak sengaja melanggar sebab belum secara penuh memahami risiko penyebaran COVID-19 dan manfaat penerapan protokol kesehatan. Penyebab ketidakpatuhan tersebut dikarenakan oleh hambatan yang dirasakan, yaitu kesulitan memahami informasi yang diberikan oleh pemerintah, sulitnya mengakses informasi karena alat komunikasi yang kurang memadai, memprioritaskan kegiatan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pernyataan dan kebijakan pemerintah yang inkonsisten. Persepsi manfaat, kebiasaan berkumpul dan merasa penerapan 3M tidak | <i>Jurnal AKRAB JUARA, 6(1).</i><br>ISSN: 2620-9861 |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | bermanfaat seiring dengan terbitnya masa normal baru dan pelanggaran PSBB. Persepsi kerentanan, orang di bawah usia 50 tahun memiliki kondisi fisik yang kuat dan kekebalan yang baik, sehingga tidak mudah terkena virus. Kesadaran akan tingkat keparahan saat terkena virus kurang serius dan tingkat kesembuhannya lebih cepat. Tidak ada petunjuk tindakan, model atau angka sebagai contoh, tidak ada sanksi tegas dan mengganggu, serta tidak ada siaran media massa yang dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap aturan protokol kesehatan |  |
| 7. | <i>When and How Trust in Government Leads to Compliance with COVID-19 Precautionary Measures</i> | Mesay Sata Shanka and Mesay Moges Menebo (2021) | Peningkatan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dikaitkan dengan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Kesadaran masalah memediasi efek kepercayaan pada pemerintah terhadap  | <i>Journal of Business Research</i><br>Volume 139<br>ISSN: 0148-2963 |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | kepatuhan terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Lebih lanjut orientasi individualistik mengurangi efek mediasi dari kesadaran masalah dalam hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dan perilaku kepatuhan.  |   |
| 8. | <i>Association Between Public Knowledge About COVID-19, Trust in Information Sources, and Adherence to Social Distancing: Cross-Sectional Survey</i> | Ilona Fridman, Nicole Lucas, Debra Henke, Christina K Zigler (2020) | Sumber informasi pemerintah adalah yang paling dipercaya masyarakat. Namun hasil penelitian tersebut menunjukkan variasi kepercayaan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yaitu dimana populasi kulit putih dan yang lebih tua umumnya menyatakan kepercayaan yang lebih tinggi pada sumber-sumber pemerintah, sementara populasi non-kulit putih dan yang lebih muda menyatakan kepercayaan yang lebih tinggi pada sumber-sumber pribadi (misalnya, CNN) dan jaringan sosial (misalnya, Twitter). Kepercayaan pada sumber pemerintah secara | <i>JMIR Public Health And Surveillance</i> , 6(3). ISSN 2369-2960 |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   | positif terkait dengan pengetahuan yang akurat tentang COVID-19 dan kepatuhan terhadap menjaga jarak. Namun, kepercayaan pada sumber pribadi (misalnya, FOX dan CNN) dikaitkan secara negatif dengan pengetahuan tentang COVID-19 serta tingkat kepatuhan menjaga jarak yang lebih rendah.  |   |
| 9. | <i>Political Partisanship Influences Behavioral Responses To Governors' Recommendations For COVID-19 Prevention In The United States</i> | Guy Grossmana, Soojong Kimc, Jonah M. Rexerd, and Harsha Thirumurthy (2020) | Keberpihakan politik memengaruhi keputusan warga negara untuk secara sukarela melakukan <i>physical distancing</i> sebagai tanggapan atas komunikasi yang dilakukan oleh gubernur atau pemimpin mereka. Masyarakat cenderung mau mengikuti arahan pemimpin yang afiliasi politiknya sesuai dengan preferensi masyarakat. Dimana rekomendasi para pemimpin pemerintah negara bagian lebih efektif dalam mengurangi mobilitas di kabupaten yang condong ke Demokrat daripada di | <i>Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(39)</i> . ISSN: 24144-24153 |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
|     |  |   | kabupaten yang condong ke Republik  |  |
| 10. | <i>Toward Effective Government Communication Strategies In The Era Of COVID-19</i> | Bernadette Hyland-Wood, John Gardner, Julie Leask & Ullrich K.H. Ecker (2021) | Strategi komunikasi pemerintah yang efektif ialah proses dua arah untuk menyampaikan pesan yang jelas melalui media yang tepat, menyesuaikannya dengan audiens yang berbeda, dan membagikannya melalui orang-orang tepercaya. Kebijakan pemerintah dapat menghasilkan dukungan dan partisipasi publik yang luas dengan melibatkan berbagai kelompok dengan meningkatkan dan mempertahankan keterlibatan masyarakat. | <i>Humanities and Social Sciences Communications</i> , 8(1). e-ISSN: 2662-9992 |

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh komunikasi kebijakan atau disebut sosialisasi dalam bentuk penyebaran informasi melalui media pemerintah yakni Instagram @lawancovid19\_id terhadap kepatuhan masyarakat menjalankan praktik pencegahan penularan virus COVID-19. Penggunaan Instagram sebagai objek penelitian dinilai peneliti lebih efektif karena karena sosial media Instagram dirasa lebih familiar dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu jika seseorang mengikuti suatu akun di Instagram, maka akan secara ‘otomatis’ berlangganan unggahan terbaru akun yang diikuti pada beranda masing-masing sehingga konten informasi yang diunggah diharapkan bisa lebih *up to date* dan *fresh* dalam menjangkau pengikutnya. Lebih lanjut, jumlah populasi yang sudah

diketahui sehingga memudahkan peneliti menghimpun data dengan menjangkau responden melalui *direct message* Instagram.

Komunikasi kebijakan dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar turut menjalankan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah aspek *physical distancing* karena aspek tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang paling rendah diantara perilaku pencegahan penularan COVID-19 yang lainnya. Kendalanya masyarakat telah terbiasa untuk berkomunikasi secara langsung dan tidak melihat penjagaan jarak secara fisik, yang mengurangi komunikasi langsung antara individu (Kresna & Ahyar, 2020). Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menerapkan jarak fisik disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat (La Ode Arwah Rahman, 2020) dalam (Christin et al., 2021, p. 3).

Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai terdapat atau tidaknya pengaruh bagaimana tindakan pemerintah akan mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti halnya mensosialisasikan kebijakan untuk menaati protokol kesehatan, kemudian melakukan edukasi mengenai COVID-19 yang diharapkan tindakan-tindakan tersebut mampu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menaati arahan yang diharapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, alasan pemilihan teknik *sampling* tersebut adalah untuk mengurangi adanya potensi bias dalam sebuah penelitian karena sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu sehingga diharapkan bebas dari bias tim peneliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang, masalah penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni masih rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya *physical distancing*. Karenanya peneliti tertarik untuk melihat aspek komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan protokol kesehatannya melalui media sosial untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah. Setelah masalah dijelaskan, pertanyaan penelitian dapat dimasukkan ke dalam penelitian yang dilakukan. Pertanyaan penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sosialisasi kebijakan COVID-19 terhadap kepatuhan masyarakat menerapkan *physical distancing* pada pengikut Instagram @lawancovid19\_id?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat seberapa besar pengaruh sosialisasi dalam bentuk penyebaran informasi COVID-19 terhadap kepatuhan penerapan *physical distancing* pada pengikut Instagram resmi pemerintah @lawancovid19\_id.

#### **1.3.1 Tujuan Praktis**

Tujuan praktis pada penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dari penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah memiliki dampak terhadap kepatuhan masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut, serta dapat diketahui pengaruhnya secara jelas dan terukur sehingga diharapkan dapat menjadi saran kepada pemerintah di masa depan.

#### **1.3.2 Tujuan Teoritis**

Tujuan teoritis pada penelitian ini yakni menguji teori yang digunakan dengan mencari fakta-fakta di lapangan melalui data yang dikumpulkan dan diolah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi bahan landasan kebijakan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan terkait tentang peranan sosialisasi kebijakan oleh pemerintah untuk pembentukan perilaku kepatuhan masyarakat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam tiap penelitian untuk dapat memiliki manfaat. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat praktis serta akademis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis adalah manfaat yang kontribusinya mampu diterapkan dalam dunia praktis. Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian bagi

pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah diharapkan temuan yang dihasilkan mampu bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai tindakan untuk melakukan komunikasi politik kepada masyarakat di media sosial khususnya terkait penanganan dan pengendalian bencana. Selain itu, manfaat praktis bagi peneliti, diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan sehingga bisa diterapkan didalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melihat teori dengan keadaan langsung di lapangan. Sementara untuk pembaca, diharapkan bisa menjadi referensi untuk para pembaca yang ingin melangsungkan riset, baik topiknya berhubungan maupun tidak.

#### 1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis adalah manfaat yang kontribusinya sesuai dengan tujuan penelitian. Manfaat akademis pada penelitian ini ialah untuk memperkaya riset tentang pengaruh dari penyebaran informasi mengenai sosialisasi dari pemerintah terhadap kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya, karena penggunaan media Instagram sebagai media untuk melakukan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dirasa cukup baik mengingat penggunaan sosial media di Indonesia yang relatif tinggi. Selain itu hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi sebagai referensi kepada penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk membantu peneliti mengklasifikasikan proses penelitian sesuai dengan kerangka ilmiah yang diharapkan untuk semua penelitian. Penelitian ini dikategorikan secara sistematis sesuai dengan struktur yang ada, yang dibagi menjadi lima bab yang meliputi:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB satu menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang memuat uraian masalah yang terjadi sehingga penelitian tersebut menarik untuk diteliti. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah, dimana berkaitan erat dengan latar belakang, yakni masalah yang didapat akan dirumuskan dalam sebuah pertanyaan yang akan dijawab. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang berisi tujuan penulisan penelitian ini baik

secara praktis maupun teoritis. Dan terakhir adalah manfaat penelitian berupa harapan kontribusi yang bisa diberikan penelitian ini baik secara praktis maupun akademis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB 2 berisi tinjauan pustaka yang mencakup tiga sub pembahasan yakni konsep dan teori penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Konsep dan teori pemikiran berisi segala teori maupun konsep yang akan digunakan di dalam penelitian sebagai acuan yang mampu menjelaskan temuan dari rumusan masalah. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran berisi gambaran umum dari alur berfikir penelitian dari rumusan masalah sampai menghasilkan jawaban dari hasil penelitian. Dan terakhir adalah hipotesis, yakni kesimpulan sementara yang dipaparkan dalam bentuk notasi  $H_0$  (menolak) atau  $H_1$  (menerima) yang nantinya akan diuji untuk memilih salah satu hipotesis yang diterima dan ditolak.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

BAB tiga meliputi teknik perolehan data, sumber data, teknik analisis data, operasionalisasi variable dan uji instrument, serta table rencana waktu. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data, adalah penjabaran dari cara serta langkah-langkah yang dipakai dalam mengumpulkan data untuk skripsi ini. Selanjutnya sumber data, yakni penjabaran dari sumber data yang akan didapat untuk penelitian bersumber dari mana. Kemudian teknik analisis data yakni cara untuk mengolah data yang telah didapat dengan metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu operasionalisasi variable dan uji instrument, untuk operasionalisasi variable adalah penjelasan yang disajikan dalam bentuk table operasionalisasi variable yang dijadikan dimensi, indicator, serta pertanyaan, kemudian dilakukan uji instrument untuk melihat tingkat kevalidan dan reabilitas dari instrument yang digunakan untuk alat penelitian nantinya. Dan terakhir adalah tabel

rencana waktu, yakni berisi penjelasan tentang pembagian waktu yang direncanakan peneliti untuk meneliti keseluruhan penelitian dari awal hingga akhir sehingga diharapkan waktunya menjadi lebih terstruktur dan terarah.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB keempat terbagi kedalam dua sub-bab yaitu hasil dari penelitian yang sudah diolah serta pembahasan interpretasinya. Dalam sub-bab pertama, yaitu analisis data, peneliti menjabarkan hasil data yang sudah diolah dari hasil pengumpulan data yang selanjutnya penjabaran deskriptif mengenai hasil analisis akan dijelaskan dalam sub-bab kedua yaitu pembahasan hasil analisis data.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB kelima sekaligus bagian penutup dari skripsi ini, meliputi dua sub-bab yakni kesimpulan dan saran (praktis dan teoritis). Pada kesimpulan menjelaskan tentang simpulan akhir yang berisi rangkaian argumen akhir dari peneliti setelah melakukan analisis data dengan bahasa yang lebih sederhana dan menjelaskan tentang temuan penelitian. Kemudian ada saran yang terbagi menjadi dua yakni saran praktis dan saran teoritis. Saran praktis menjelaskan tentang usulan-usulan yang berguna bagi dunia praktis agar *stakeholder* terkait mampu menjadikan penelitian ini sebagai bagian dari kontribusi akademik yang mampu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (*decision making*). Saran teoritis sendiri menjelaskan tentang usulan-usulan yang berguna untuk dunia akademis yang menjelaskan kelemahan dan kelebihan penelitian dan memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya dalam perspektif yang berbeda atau yang belum di bahas pada penelitian ini sehingga penelitian ini bisa berguna bagi kontribus pengembangan akademik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi berbagai sumber dan referensi yang digunakan pada skripsi ini memuat buku, jurnal, media, serta referensi lainnya.

## **LAMPIRAN**

Berisi lampiran-lampiran yang dipakai dalam skripsi ini.